

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Tingkat Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah antara Kabupaten dan Kota dalam tiga tahun terakhir di antaranya pada tahun 2009 yang menghasilkan proporsi pertumbuhan Komponen PAD terbesar adalah Kabupaten Sumba Tengah yaitu pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 647,61%, Retribusi Daerah oleh Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 403,23%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan oleh Kabupaten Rote Ndao sebesar 75% dan Lain-lain PAD yang Sah oleh Kabupaten Sumba Tengah sebesar 184,30% .

Untuk Tahun 2010, yang memiliki pertumbuhan Komponen PAD terbesar adalah : Pajak Daerah oleh Kabupaten Kupang sebesar 111,95%, Retribusi Daerah oleh Kabupaten Belu sebesar 115,52%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan oleh Kabupaten Manggarai Timur sebesar 968,75% dan Lain-lain PAD yang Sah oleh Kabupaten Manggarai Timur sebesar 101,79%.

Dan untuk Tahun 2011 yang memiliki pertumbuhan Komponen PAD terbesar adalah : Pajak Daerah oleh Kabupaten Sumba Tengah sebesar 122,68%, Retribusi Daerah oleh Kabupaten Nagekeo sebesar 136,94, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan oleh

Kabupaten Manggarai Timur sebesar 274,04% dan Lain-lain PAD yang Sah oleh Kabupaten Sabu Raijua sebesar 338,54%.

6.2 Saran

Berdasarkan Hasil Analisis dan Perhitungan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah antara Kabupaten dan Kota se Provinsi NTT serta beberapa kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang sekiranya bisa dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, antara lain:

1. Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten dan Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan untuk melakukan penilaian dan mengevaluasi serta untuk menambah kualitas sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten dan Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur, diharapkan dapat meningkatkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah pada sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim Abdul, 2001. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Selemba Empat. Jakarta.
- Halim Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim Abdul, 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010 . *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi.
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta. 2010.
- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999. *Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*
- Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999. *Tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, Jakarta*.